

Implementasi BUMDes sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Empiris di Desa Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik

Jessica Wildani Habibah, Tukiman

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
jessicawildani321@gmail.com, tukiman.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to analyze the Implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as an Instrument for Village Community Empowerment: An Empirical Study in Balongpanggung Village, Balongpanggung District, Gresik Regency. The southern area of Gresik still experiences development disparities that have resulted in suboptimal BUMDes management. However, BUMDes Jaya Abadi in Balongpanggung Village has shown relatively positive development and has received several awards, making it an interesting case for further analysis. This research employs a qualitative approach using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of BUMDes Jaya Abadi has been carried out through the management of various village business units and the application of four development aspects as the basis of its activities. Nevertheless, the role of BUMDes in encouraging active community participation and strengthening local capacity has not been fully optimized. The main challenges include limited human resources, low public understanding of BUMDes programs, and the underutilization of digital technology in business governance. Therefore, strengthening communication, improving managerial capacity, implementing digital systems, and expanding community participation are necessary to achieve more effective and sustainable BUMDes implementation.

Keywords: *BUMDes Implementation; Community Participation; Rural Development*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi BUMDes sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Empiris di Desa Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Wilayah Gresik bagian selatan masih menghadapi ketimpangan pembangunan desa yang berdampak pada belum optimalnya pengelolaan BUMDes. Namun, BUMDes Jaya Abadi di Desa Balongpanggung menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan berhasil meraih sejumlah penghargaan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BUMDes Jaya Abadi telah dilaksanakan melalui pengelolaan berbagai unit usaha

desa dan penerapan empat aspek bina sebagai dasar kegiatan. Meskipun demikian, peran BUMDes dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan penguatan kapasitas lokal belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program BUMDes, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam tata kelola usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pengelola, digitalisasi sistem, serta perluasan partisipasi masyarakat agar implementasi BUMDes dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan..

Kata kunci: Implementasi BUMDes; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dalam kerangka otonomi daerah diarahkan pada penguatan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan, serta menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan (Handraini dkk., 2024). Pembangunan pedesaan tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga menempatkan desa sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, penguatan demokrasi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan public (Hidayatulloh & Yani, 2021). Pergeseran paradigma ini menempatkan desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terlebih mengingat hampir setengah penduduk Indonesia bermukim di wilayah perdesaan (Firmansyah dkk., 2024).

Penerapan otonomi desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola pemerintahan, merumuskan inisiatif pembangunan, serta memperkuat praktik demokrasi lokal. (Kaunang & Sumampouw, 2019). Dengan kewenangan tersebut, desa diharapkan mampu mengembangkan potensi dan sumber dayanya secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada program pembangunan dari pemerintah di tingkat atas. Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mendukung kemandirian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai entitas ekonomi kolektif hasil kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes tidak hanya berperan sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa (Fitriyanti, 2019).

Di Provinsi Jawa Timur, BUMDes menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa. Peningkatan jumlah desa mandiri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi BUMDes dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, tidak semua desa mampu mengembangkan dan

memanfaatkan BUMDes secara optimal (Wahyudinata, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan BUMDes merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kapasitas kelembagaan serta partisipasi masyarakat yang memadai. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Gresik, di mana masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Wilayah Gresik bagian selatan, yang didominasi oleh desa agraris, cenderung memiliki keterbatasan infrastruktur dan layanan publik dibandingkan wilayah utara. Ketimpangan tersebut tercermin dari perbedaan tingkat perkembangan BUMDes antar desa, yang mengindikasikan bahwa kinerja BUMDes belum sepenuhnya optimal sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks tersebut, Desa Balongpanggang mendirikan BUMDes Jaya Abadi pada tahun 2016 yang kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2021. BUMDes Jaya Abadi diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini mengelola sembilan unit usaha yang meliputi pasar tradisional, pasar sapi, pasar sayur, pasar ayam, terminal lyn, persewaan ruko, retribusi sampah, grosir sembako, serta jasa pembayaran. Berbagai capaian dan penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa BUMDes Jaya Abadi dapat dikategorikan sebagai BUMDes maju, meskipun jumlah BUMDes dengan kategori serupa di wilayah tersebut masih relatif terbatas.

Selain pengembangan unit usaha, BUMDes Jaya Abadi juga menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan, seperti pelatihan batik Balongkemisan, Haskar Desa, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BUMDes berperan dalam membina pelaku UMKM desa, termasuk produksi keripik brownies, jamu, kue pie, dan batik kemisan. Sejak dilakukannya sosialisasi pada tahun 2018, pengembangan produk UMKM terus mengalami peningkatan, termasuk inovasi motif batik khas Desa Balongpanggang yang dikelola oleh BUMDes sebagai bagian dari strategi branding dan pemasaran produk lokal. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya proses pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan partisipasi warga.

Meskipun BUMDes Jaya Abadi telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pengelolaan unit usaha dan pencapaian penghargaan, termasuk masuk dalam kategori lima besar BUMDes terbaik di Kabupaten Gresik, kajian yang menganalisis perannya secara komprehensif dalam pemberdayaan masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis implementasi BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial, kelembagaan, dan kemandirian masyarakat. Fokus pada

pemberdayaan masyarakat dipilih karena keberhasilan BUMDes tidak semata-mata diukur dari capaian finansial, melainkan dari kemampuannya dalam meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga desa

Pembangunan desa dalam otonomi daerah menekankan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan (Handraini dkk., 2024). Pembangunan pedesaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi melalui infrastruktur, dengan desa sebagai pelopor pembangunan, penjamin persatuan, demokrasi, dan kualitas pelayanan publik (Hidayatulloh & Yani, 2021). Desa kini dipandang bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup, terlebih karena sekitar 49% penduduk Indonesia tinggal di desa (Firmansyah dkk., 2024).

Otonomi desa memberi kewenangan luas bagi desa untuk mengelola pemerintahan, berinisiatif dalam pembangunan, dan menguatkan demokrasi, sehingga desa dapat membangun tanpa bergantung sepenuhnya pada program pemerintah di level atas (Kaunang & Sumampouw, 2019). Desa didorong menjadi mandiri melalui pembentukan BUMDes, yakni entitas ekonomi kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa (Fitriyanti, 2019).

Di Jawa Timur, desa menjadi tumpuan ekonomi melalui BUMDes. Desa mandiri naik dari 2.800 pada tahun 2023 menjadi 4.019 pada tahun 2024, menurunkan kemiskinan menjadi 9,79%. Total BUMDes kini 6.582, dengan 1.400 termasuk maju (Wahyudinata, 2024). Namun, tidak semua desa di Jawa Timur memiliki BUMDes yang berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal, menegaskan bahwa pengembangan BUMDes bukan hal yang mudah. Di Kabupaten Gresik, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun, terdapat 290 Desa Mandiri dan 40 Desa Maju. Wilayah Gresik bagian selatan didominasi desa agraris dengan infrastruktur dan layanan publik tertinggal dibanding wilayah utara. RPJMD 2021–2026 menyoro ketimpangan pembangunan ini, sejalan dengan temuan Komisi 1 DPRD Gresik bahwa perbedaan antara BUMDes maju dan berkembang menunjukkan kinerja BUMDes masih belum optimal.

Dalam kondisi tersebut, Desa Balongpanggang mendirikan BUMDes Jaya Abadi pada 2016, diperkuat dengan SK Kepala Desa No. 12 Tahun 2021. BUMDes ini berfokus pada optimalisasi potensi dan sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa BUMDes Jaya Abadi layak dikategorikan sebagai BUMDes maju. Balongpanggang sendiri BUMDes yang maju masih tergolong belum banyak. BUMDes ini memiliki 9 (Sembilan) unit usaha di

antaranya unit pasar tradisional, unit pasar sapi, unit pasar sayur, unit pasar ayam, unit terminal lyn, unit persewaan ruko, unit retribusi sampah, unit grosir sembako, unit jasa pembayaran.

BUMDes Jaya Abadi memberikan berbagai pelatihan bagi masyarakat Desa Balongpanggung, termasuk batik Balongkemisan, Haskar Desa, dan UMKM. BUMDes juga membina UMKM desa seperti keripik brownies, jamu, kue pie, dan batik kemisan. Sejak sosialisasi 2018, produk UMKM terus dikembangkan, termasuk inovasi motif batik khas desa yang dikelola BUMDes untuk branding dan pemasaran produk lokal, menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat yang berjalan aktif.

Meskipun BUMDes Jaya Abadi di Desa Balongpanggung telah menunjukkan kinerja baik, termasuk capaian unit usaha dan penghargaan Top 5 BUMDes di Kabupaten Gresik, belum ada kajian yang menilai secara menyeluruh perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini penting untuk memahami kontribusi BUMDes tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial, kelembagaan, dan kemandirian warga. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dipilih karena keberhasilan BUMDes tidak cukup diukur dari aspek finansial, melainkan dari kemampuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam Implementasi BUMDes sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Empiris di Desa Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Teknik analisis data mengacu pada model analisis kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode utama. Lokasi penelitian berada di BUMDes Jaya Abadi Desa Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Fokus penelitian merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto dan Soebianto yang mencakup empat indikator yaitu, bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina lembaga. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi selama kegiatan lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan perencanaan, buku, jurnal, artikel, serta dokumentasi foto atau arsip yang relevan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini meliputi Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes,

Staff BUMDes serta Masyarakat penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa dalam otonomi daerah menekankan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan (Handraini dkk., 2024). Pembangunan pedesaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi melalui infrastruktur, dengan desa sebagai pelopor pembangunan, penjamin persatuan, demokrasi, dan kualitas pelayanan publik (Hidayatulloh & Yani, 2021). Desa kini dipandang bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup, terlebih karena sekitar 49% penduduk Indonesia tinggal di desa (Firmansyah dkk., 2024).

Otonomi desa memberi kewenangan luas bagi desa untuk mengelola pemerintahan, berinisiatif dalam pembangunan, dan menguatkan demokrasi, sehingga desa dapat membangun tanpa bergantung sepenuhnya pada program pemerintah di level atas (Kaunang & Sumampouw, 2019). Desa didorong menjadi mandiri melalui pembentukan BUMDes, yakni entitas ekonomi kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa (Fitriyanti, 2019).

Di Jawa Timur, desa menjadi tumpuan ekonomi melalui BUMDes. Desa mandiri naik dari 2.800 pada tahun 2023 menjadi 4.019 pada tahun 2024, menurunkan kemiskinan menjadi 9,79%. Total BUMDes kini 6.582, dengan 1.400 termasuk maju (Wahyudinata, 2024). Namun, tidak semua desa di Jawa Timur memiliki BUMDes yang berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal, menegaskan bahwa pengembangan BUMDes bukan hal yang mudah. Di Kabupaten Gresik, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun, terdapat 290 Desa Mandiri dan 40 Desa Maju. Wilayah Gresik bagian selatan didominasi desa agraris dengan infrastruktur dan layanan publik tertinggal dibanding wilayah utara. RPJMD 2021–2026 menyoroti ketimpangan pembangunan ini, sejalan dengan temuan Komisi 1 DPRD Gresik bahwa perbedaan antara BUMDes maju dan berkembang menunjukkan kinerja BUMDes masih belum optimal.

Dalam kondisi tersebut, Desa Balongpanggang mendirikan BUMDes Jaya Abadi

pada 2016, diperkuat dengan SK Kepala Desa No. 12 Tahun 2021. BUMDes ini berfokus pada optimalisasi potensi dan sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa BUMDes Jaya Abadi layak dikategorikan sebagai BUMDes maju. Balongpanggung sendiri BUMDes yang maju masih tergolong belum banyak. BUMDes ini memiliki 9 (Sembilan) unit usaha di antaranya unit pasar tradisional, unit pasar sapi, unit pasar sayur, unit pasar ayam, unit terminal lyn, unit persewaan ruko, unit retribusi sampah, unit grosir sembako, unit jasa pembayaran.

BUMDes Jaya Abadi memberikan berbagai pelatihan bagi masyarakat Desa Balongpanggung, termasuk batik Balongkemisan, Haskar Desa, dan UMKM. BUMDes juga membina UMKM desa seperti keripik brownies, jamu, kue pie, dan batik kemisan. Sejak sosialisasi 2018, produk UMKM terus dikembangkan, termasuk inovasi motif batik khas desa yang dikelola BUMDes untuk branding dan pemasaran produk lokal, menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat yang berjalan aktif.

Meskipun BUMDes Jaya Abadi di Desa Balongpanggung telah menunjukkan kinerja baik, termasuk capaian unit usaha dan penghargaan Top 5 BUMDes di Kabupaten Gresik, belum ada kajian yang menilai secara menyeluruh perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini penting untuk memahami kontribusi BUMDes tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial, kelembagaan, dan kemandirian warga. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dipilih karena keberhasilan BUMDes tidak cukup diukur dari aspek finansial, melainkan dari kemampuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa.

Bina Manusia

Aspek bina manusia menjadi fokus BUMDes Jaya Abadi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan (membatik Balongkemisan, Hasta Karya) serta pembinaan kelompok seperti PKK dan karang taruna, guna mendorong kemampuan manajerial dan partisipasi aktif warga. Namun, sebagian masyarakat belum menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan program BUMDes, sehingga partisipasi belum merata dan komunikasi lembaga masih perlu diperkuat.

Tingkat keterlibatan warga sekitar 60%, sempat rendah karena sosialisasi yang kurang merata, apatisme sebagian masyarakat, dan meningkatnya aktivitas digital. BUMDes merespons dengan pendekatan personal dan komunikasi intensif hingga antusiasme warga berangsur meningkat.

Secara administratif, kegiatan dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menjaga transparansi, namun masih terdapat kendala seperti dokumentasi kurang lengkap, staf merangkap tugas, dan pemahaman laporan yang belum optimal. Secara keseluruhan, BUMDes Jaya Abadi telah menjalankan bina

manusia melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, tetapi keberhasilan program masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, partisipasi yang belum merata, dan kendala administrasi sehingga diperlukan penguatan komunikasi, sosialisasi, dan tata kelola agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

Bina Usaha

Aspek Bina Usaha di BUMDes Jaya Abadi menunjukkan pengelolaan yang terstruktur melalui koordinasi internal dan eksternal yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga ekonomi lokal. Evaluasi rutin antar-unit usaha menjaga stabilitas operasional, sementara pengurus muda berperan sebagai jembatan komunikasi antara desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat masih terbatas karena keterlibatan warga lebih bersifat informatif dan eksekutif, sementara keputusan strategis didominasi pengurus BUMDes dan pemerintah desa.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan inklusivitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas dijalankan melalui mekanisme resmi pembentukan unit usaha, pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan evaluasi berkala dengan format administrasi baku. Meski demikian, kapasitas SDM masih menjadi tantangan karena sebagian staf belum memahami prosedur dan fungsi secara optimal. Secara keseluruhan, BUMDes Jaya Abadi telah mengelola Bina Usaha dengan baik melalui koordinasi teratur dan sistem administrasi tertib. Namun, peningkatan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar pemberdayaan ekonomi desa menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Bina Lingkungan

Aspek bina lingkungan di BUMDes Jaya Abadi terlihat melalui keterlibatan dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pembinaan masyarakat yang dilakukan bersama perangkat desa dan warga. Upaya ini menunjukkan integrasi nilai kelestarian lingkungan ke dalam aktivitas sosial dan ekonomi desa. Salah satu bentuk nyata adalah adanya unit usaha retribusi sampah pasar desa, di mana petugas mengambil sampah pasar setiap hari sehingga area pasar tetap bersih dan nyaman. Unit ini ikut mendukung kualitas lingkungan sekaligus menambah pendapatan desa. Namun, keberhasilan program lingkungan masih bergantung pada partisipasi masyarakat yang tingkat kesadarannya belum merata dan sarana prasarana masih terbatas.

Warga sebagian sudah memilah sampah, tetapi sebagian lainnya masih mencampur, sehingga pengelolaan sampah belum optimal di seluruh wilayah desa. Bank Sampah “Lingkungan Bersahabat” juga menjadi salah satu program lingkungan di desa, keterlibatan BUMDes dalam bank sampah bersifat kolaboratif melalui dukungan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat, bukan struktural. Kolaborasi ini tetap berkontribusi pada aspek bina lingkungan meskipun belum terintegrasi penuh ke dalam kelembagaan

BUMDes. Dari sisi tata kelola, pelaporan kegiatan lingkungan sudah dilakukan, tetapi belum didukung regulasi internal, indikator capaian, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, BUMDes Jaya Abadi telah menunjukkan inisiatif positif dalam pelestarian lingkungan melalui retribusi sampah pasar desa, kolaborasi bank sampah, serta pemberdayaan masyarakat. Agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan regulasi internal, dan sistem evaluasi lingkungan yang lebih sistematis.

Bina Lembaga

Aspek Bina Lembaga di BUMDes Jaya Abadi berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama lembaga ini berada pada unit usaha strategis, khususnya sektor perdagangan seperti pasar umum dan pasar hewan yang menjadi penyumbang besar PAD desa. Penguatan lembaga dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus, pembangunan kepercayaan masyarakat, serta kerja sama dengan perbankan, koperasi, pelaku usaha, dan pemerintah.

Sistem administrasi dan koordinasi internal berjalan cukup baik. Setiap unit usaha memiliki manajer/pic operasional dan petugas keuangan yang melaporkan ke manajemen pusat. Rapat rutin, pembagian tugas berbasis SOP, komunikasi terpadu, dan evaluasi berkala mendukung kelancaran operasional serta transparansi antar-unit. Meski tata kelola sudah terstruktur, tantangan masih ditemui, seperti kebutuhan peningkatan sinergi lintas pihak, penguatan modal, persaingan usaha, serta optimalisasi transparansi administrasi termasuk digitalisasi dan publikasi laporan.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen pendukung usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang terbantu dalam akses layanan ekonomi. Meskipun tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga, keterlibatan ini menguatkan hubungan sosial-ekonomi antara masyarakat dan BUMDes. Secara keseluruhan, kinerja bina lembaga di BUMDes Jaya Abadi dinilai positif, namun peningkatan kapasitas SDM, fleksibilitas administrasi, sinergi kemitraan, serta mekanisme partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan lembaga semakin adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jaya Abadi. Pelaksanaan program bina di BUMDes Jaya Abadi mencakup aspek bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga yang secara umum menunjukkan kinerja

positif namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Pada aspek Bina Manusia, BUMDes telah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan. Antusiasme warga menunjukkan peningkatan, tetapi kesadaran masyarakat mengenai peran BUMDes masih belum merata sehingga partisipasi belum optimal. Kendala teknis seperti dokumentasi administrasi dan perangkapan tugas juga perlu dibenahi.

Aspek Bina Usaha berjalan cukup baik melalui koordinasi internal yang teratur, hubungan harmonis dengan pemerintah desa, dan administrasi usaha yang tertib. Namun, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas, dan peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan agar pengelolaan usaha lebih efektif dan inklusif. Pada aspek Bina Lingkungan, BUMDes menunjukkan kontribusi positif melalui retribusi sampah pasar desa yang menjaga kebersihan pasar harian serta kolaborasi dengan Bank Sampah “Lingkungan Bersahabat”. Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum merata dan dukungan regulasi serta evaluasi lingkungan masih perlu diperkuat agar program lebih berkelanjutan.

Sementara itu, aspek Bina Lembaga telah mendukung penguatan struktur ekonomi desa melalui pengembangan unit usaha strategis, sistem administrasi terpadu, dan kerja sama lintas lembaga. Tantangan yang masih muncul meliputi kebutuhan peningkatan modal, sinergi kemitraan, digitalisasi administrasi, serta perluasan partisipasi UMKM dan warga. Secara keseluruhan, BUMDes Jaya Abadi telah berhasil menjalankan peran pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa melalui penerapan empat aspek bina secara terpadu. Namun, agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi tata kelola, serta perluasan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk BUMDes Jaya Abadi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada sebagai ruang publik yang lebih baik di masa mendatang. Pertama, BUMDes Jaya Abadi perlu memperkuat sosialisasi dan komunikasi publik agar masyarakat memahami peran serta manfaat BUMDes. Sosialisasi yang lebih intensif—melalui pertemuan desa maupun media digital—diharapkan meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Kedua, penguatan kapasitas SDM penting dilakukan melalui pelatihan lanjutan terkait manajemen usaha, administrasi, teknologi, dan pemahaman SOP. Pengelolaan internal

yang lebih profesional, dengan pembagian tugas yang jelas, akan meningkatkan efektivitas operasional BUMDes. Ketiga, BUMDes juga perlu meningkatkan transparansi melalui digitalisasi administrasi dan pencatatan keuangan. Dokumentasi kegiatan yang konsisten serta indikator kinerja yang jelas akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi program. Keempat, keberlanjutan lingkungan dan perluasan jejaring kemitraan harus diperkuat. Pengelolaan lingkungan yang lebih teratur serta kolaborasi dengan perbankan, UMKM, koperasi, dan instansi pemerintah dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan stabilitas ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Handraini, H., Frinald, A., & Magriasti, L. (t.t.). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia.
- Hidayatulloh, M. F., & Yani, M. T. (2021). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p540-554>
- Hasan, M., Ismawan, dkk. (2021). *Desa dan BUMDes*. Yogyakarta: Nuta Media
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9796-9802.
- Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. 2(2).
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes dalam membangun desa*. Pontianak: CV Derwati Press.
- Septiani, S., & Purnamasari, H. (2024). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Posyandu di Desa Rengasdengklok Utara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 4442-4446.
- Tyastuti, S., & Ismaniah, E. (2021). *Strategi efektivitas pemberdayaan BUMDes*. Jakarta: Bintang Semesta Media.
- Wahyuningtiyas, K. P., & Bachri, S. (2024). Penerapan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Mobile Learning untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Peserta Didik. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, 2(2), 141-149